



# LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024



BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTT

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu dan mengawal tugas dan fungsi Biro Organisasi.

Melalui Laporan Kinerja Triwulan I ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Biro Organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam merumuskan kebijakan daerah, penyiapan pengordinasian, pelaksanaan dan pencapaian target kinerja.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Kupang, 24 Juli 2024

Plt. Kepala Biro Organisasi  
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, 



Djoese S.M. Nai Buti, S.Pt, M.Si  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP 197103291999031002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas dan Fungsi Biro Organisasi.....	1
1.3. Struktur Organisasi .....	2
1.4. Sistematika Penyajian.....	2
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>4</b>
2.1. Rencana Strategis Biro Organisasi.....	4
2.2. Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2024 .....	4
<b>BAB III.    AKUNTABILITAS KINERJA TRIWULAN I .....</b>	<b>8</b>
3.1. Rencana Kerja pada Tahun 2024 .....	8
3.2. Realisasi Anggaran .....	9
3.3. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I .....	10
Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan .....	10
Bagian Tatalaksana.....	13
Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas.....	17
3.4. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja.....	20
<b>BAB IV.    PENUTUP .....</b>	<b>23</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu unsur staf penyusun Kebijakan Daerah dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelayanan administrasi umum di Bidang Organisasi yang bertugas membantu Gubernur dan menyusun kebijakan organisasi daerah dibidang administrasi umum.

Untuk merealisasi tugas dan fungsi tersebut, Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama Triwulan I tahun anggaran 2024 telah melakukan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan dengan maksud agar dapat membantu dan mengawal tugas dan fungsi Biro Organisasi sehingga target kinerja dapat tercapai

Sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2024, maka disusunlah Laporan Kinerja Triwulan I. Laporan Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014. Melalui Laporan Kinerja Triwulan I ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Biro Organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam merumuskan kebijakan daerah, penyiapan pengordinasian, pelaksanaan dan pencapaian target kinerja.

### **1.2 Tugas dan Fungsi Biro Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas Biro Organisasi melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;

2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten administrasi umum.

### **1.3 Struktur Organisasi**

Struktur Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas :

1. Kepala Biro
2. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
  - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3. Kepala Bagian Tata Laksana
  - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
  - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

### **1.4 Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja secara umum menginformasikan capaian kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada akhir Triwulan I Tahun 2024. Membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plants*) sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi dan struktur organisasi serta sistematika penyajian.

Bab. II Perencanaan Kinerja, menjelaskan rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024

Bab. III Akuntabilitas Kinerja, menggambarkan rencana kerja tahun 2024 dan realisasi kegiatan Triwulan I tahun 2024.

Bab. IV Penutup, menjelaskan kesimpulan Laporan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tirwulan I tahun 2024 dan menguraikan rencana tindaklanjut yang perlukan bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis Biro Organisasi**

Pada rencana strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Renstra Biro organisasi memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **2.2 Pejanjian Kinerja Tahun 2024**

Dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Maka setiap tahun setiap pimpinan perangkat daerah sesuai arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, wajib menandatangani perjanjian kinerja. Perjanjian Kepala Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun rincian sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Tabel 2.2**

**A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI				FORMULA INDIKATOR
				AWAL	TARGET			
1	2	3	4	2023	2024	2025	2026	9
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tatallaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90)	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90) adalah indikator yang mengukur kualitas hasil pelaksanaan RB oleh Perangkat Daerah yang memiliki Nilai/Indeks 80 – 90.	39,39	45,45	51,51	57,57	$\frac{\text{Jumlah PD Provinsi yang memperoleh Predikat RB "Istimewa"}}{\text{Total Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}} \times 100\%$
		Level Maturitas Kelembagaan	Level Maturitas Kelembagaan adalah Penilaian tingkat kematangan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan instrumen pengukuran dengan 11 (sebelas) variabel indikator yang meliputi: a. perencanaan; b. monitoring dan pengendalian; c. penjaminan mutu layanan; d. standar operasional prosedur;	40,67	45	47	49	$\frac{\text{Kematangan Organisasi Daerah}}{\text{Total Nilai PD Lingkup Provinsi NTT}} = \frac{\text{Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}}{\text{Total Nilai PD Lingkup Provinsi NTT}}$



	Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A.	Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A adalah aktifitas analisis yang sistematis untuk menilai penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada PD dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Timur.	6	12	18	24	Jumlah PD yang memperoleh nilai A (memuaskan) <hr/> Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT x 100%
--	--	--	---	----	----	----	---

## B. Pelaksanaan Anggaran

1)	APBD	Uraian	Alokasi	Keterangan
	<b>a) Belanja (Program)</b>		Rp. 1.500.000.000,-	Realisasi minimal 85%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp. 661.473.673,-	Realisasi minimal 90%
2	Penataan Organisasi		Rp. 838.526.327,-	Realisasi minimal 85%
	<b>b) Pendapatan</b>		Rp. -	-

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA TRIWULAN I**

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal penting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dimaksud sebagai hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

#### **3.1 Rencana Kerja pada Tahun 2024 pada Biro Organisasi meliputi program sebagai berikut :**

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
  - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 150.880.650,-
  - 1.2 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 31.230.800,-
  - 1.3 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 23.716.600,-.
  - 1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 54.750.000,-
  - 1.5 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
  - 1.6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 299.373.023,00
  - 1.7 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp 25.000.000,-.
  - 1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 66.220.000,-
  - 1.9 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-
- II. Program Penataan Organisasi
  - 2.1 Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 183.931.250,-

2.2 Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja dengan anggaran sebesar Rp. 654.595.077,-

**3.2 Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran tahun 2024 dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 3.1**

Kode Rek	Uraian	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Triwulan I Tahun 2024	Capaian
	<b>Biro Organisasi</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>375.000.000</b>	<b>25,00</b>
4.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan	661.473.673	168.615.100	25,49
4.01.02	Program Penataan Organisasi	838.526.327	206.384.900	24,61
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Anjab	183.931.250	62.303.503	33,87
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	75.000.000	28.331.441	37,35
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/kota	30.356.250	-	-
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisi Jabatan	78.575.000	33.992.062	43,26
4.01.02.1.02	Fasilitasi RB dan AK	654.595.077	144.081.397	22,01
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan RB	102.678.125	26.371.770	25,68
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi AK	255.356.250	52.826.947	20,69
4.01.02.1.02.03	Evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja	52.678.125	-	-
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan tatalaksana Pemerintah	105.256.250	39.003.000	37,02
4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	138.526.327	25.879.680	18,68
<b>JUMLAH</b>		<b>1.500.000.000</b>	<b>375.000.00</b>	<b>25,00</b>

### 3.3 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Tahun 2024

#### I. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

##### 1. Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I sesuai dengan Renja/DPA 2024

Alokasi anggaran tahun 2024 dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2

No.	Sub Kegiatan	Alokasi dana	Target Triwulan I %	Realisasi Triwulan I %	Hasil	Ket.
1	Fasilitasi Kelembagaan Provinsi	Rp. 75.000.000	Rp. 28.331.441	37,35 %		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp. 114.000	Rp. 114.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 2.072.000	Rp. 2.072.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Cetak	Rp. 4.747.000	Rp. 3.852.000			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 2,100,000	Rp. 2.100.000			
	Belanja Lembur	Rp. 11.150.000	Rp. 6.570.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 45.317.000	Rp. 6.223.441			
2	Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten/ Kota	Rp. 30.356.250	Rp. -			
3	Fasilitasi Analisis Jabatan	Rp. 78.575.000	Rp. 33.992.062	42,26 %		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp. 228.000	Rp. 22.8000			
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - kertas dan cover	Rp. 6.601.000	Rp. 2.884.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Cetak	Rp. 3.276.000	Rp. 1.042.000			
	Jasa tenaga operator computer	Rp. 24.000.000	Rp. 4.000.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 33.410.000	Rp. 22.358.062			
	Total	Rp. 183.931.250	Rp. 62.303.503	33,87%		

##### 2. Pelaksanaan Kegiatan dan Tugas Lainnya

a. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Tugas terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Hasil	Ket.
A.	Kelembagaan			
	1. Desk Evaluasi Kelembagaan Perangkat	Tanggal 26 Februari 2024	Instrumen Evaluasi Kelembagaan	

	daerah berdasarkan PerMenPAN RB Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah			
	2. Fasilitasi ke Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka Pengumpulan Data Evaluasi kelembagaan di Perangkat Daerah Lingkup PD Provinsi NTT		Data Evaluasi kelembagaan di Perangkat Daerah Lingkup PD Provinsi NTT	
	3. Fasilitasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka Finalisasi Pengumpulan Data Evaluasi kelembagaan di Perangkat Daerah Lingkup PD Provinsi NTT		Berita Acara yang berisikan hasil skor masing-masing subdimensi evaluasi kelembagaan Perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi NTT	
	4. Melakukan Studi Tiru Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah (Penerapan Praktek Baik Reformasi Birokrasi);	Tanggal 30 Januari – 01 Februari 2024	Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah (Penerapan Praktek Baik Reformasi Birokrasi);	
	5. Asistensi Kelembagaan bersama Bagian Organisasi Setda Kota Kupang, Dinas Kesehatan Kota Kupang dan UPTD Brigade Kupang Sehat		Rekomendasi Kelembagaan UPTD <i>Public Safety Center</i> 119 Brigade Kupang Sehat pada Dinas Kesehatan Kota Kupang	Nomor : 0008.5/02/BO1. 2 Tanggal: 06 Februari 2024
	6. Asistensi Kelembagaan bersama Bagian Organisasi Setda Kab. Flores Timur dan Bappeda Kab. Flores Timur	Maret 2024	Rekomendasi Penataan Kelembagaan BAPPERIDAKabupaten Flores Timur	Nomor : 0008.5/17/BO1. 2 Tanggal : 18 maret 2024
	7. Asistensi Kelembagaan bersama Bagian Organisasi Setda Kab. Manggarai Barat		Rekomendasi Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Nomor : 0008.5/20/BO1.2 Tanggal : 03 April 2024
B.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja			
	1. Melakukan Studi Tiru Penyusunan dan Penerapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Penerapan Praktek Baik Reformasi Birokrasi);	Tanggal 30 Januari – 01 Februari 2024	Penyusunan dan Penerapan Analisis Jabatan dan ABK (Penerapan Praktek Baik RB);	

	2. Konsultasi dan koordinasi analisis jabatan dan analisis beban kerja di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;	Tanggal 26- 28 Februari 2024	Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan Analisis Jabatan dan ABK (Penerapan Praktek Baik RB);	
	3. Melakukan Desk Penginputan Peta Jabatan Dalam Aplikasi SIASN Perencanaan Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tanggal 25 s/d 26 Maret 2024	Terlaksananya peta jabatan dalam Aplikasi SIASN berdasarkan jabatan yang ada dalam KepMenPAN RB Nomor 173 Tahun 2024	Akhir penginputan peta jabatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Aplikasi SIASN 20 April 2024
	4. Penerbitan Rekomendasi hasil validasi kelas jabatan dan beban kerja untuk seluruh Perangkat Daerah	Tanggal Januari s/d Februari 2024	Rekomendasi untuk Triwulan I hasil validasi kelas jabatan dan beban kerja perangkat daerah dan Form D pada Aplikasi TPP Pemerintah Provinsi NTT untuk Bulan Januari	

**b. Permasalahan**

- Perubahan regulasi yang menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan evaluasi jabatan untuk seluruh Perangkat Daerah yang harus menyesuaikan dengan SOTK terbaru.
- Keterbatasan Anggaran mengakibatkan beberapa pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Tidak semua kegiatan yang dapat dilaksanakan bersamaan.
- Keberhasilan pencapaian target kinerja pada Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan juga bergantung pada komitmen perangkat daerah.

**c. Solusi**

- Mengupayakan Pendampingan secara bertahap bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan evaluasi jabatan;
- Memaksimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan skala Prioritas.
- Memberikan ruang konsultasi dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang ada.

## II. Bagian Tatalaksana

### 1. Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I sesuai dengan Renja/DPA 2024

Alokasi anggaran tahun 2024 dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.4

No.	Sub Kegiatan	Alokasi dana	Target Triwulan I %	Realisasi Triwulan I %	Hasil	Ket.
1	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Rp. 105.256.250	Rp. 39.003.000	37,02 %		
	Alat Tulis Kantor Penyusunan SOP AP	Rp. 851.000	Rp. 742.000			
	Belanja Lembur	Rp. 50.175.000	Rp. 26.515.000			
	Perjalanan Dinas dalam rangka Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten TTU, Flores Timur dan Kabupaten Malaka	Rp. 30.249.000	Rp. 11.086.000			
	Biaya Makan Minum Rapat Persiapan Evaluasi Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP AP Lingkup Pemerintah	Rp. 18.780.000	Rp. 660.000			
2	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp. 138.526.327	Rp. 25.879.680	18,68 %		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - kertas cover	Rp. 1.332.000	Rp. 1.332.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Cetak	Rp. 5.698.327	Rp. 1.400.000			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 13.800.000	Rp. 2.700.000			
	Belanja Lembur	Rp. 54.030.000	Rp. 11.620.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 31.966.000	Rp. 8.827.680			

### 2. Pelaksanaan Kegiatan dan Tugas Lainnya

a. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Tugas terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Hasil	Ket.
A.	Tata Laksana Pemerintahan			
	1. Pendampingan Evaluasi SOP AP pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Tanggal 21 Januari 2024	Terlaksananya Penyusunan Review SOP AP	Kep gub Nomor 39/KEP/HK/2016 (Proses Review)
	2. Pendampingan Evaluasi SOP AP Biro Organisasi	Tanggal 4 Januari 2024	Terlaksananya Penyusunan	Kep Gub Nomor 350/KEP/HK/2021(Proses

	Provinsi NTT		Review SOP AP	Review)
	3. Pendampingan Evaluasi SOP AP Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTT	Tanggal 27 Februari 2024	Terlaksananya Penyusunan Review SOP AP	Kep Gub Nomor 351/KEP/HK/2021 (Proses Review)
	4. Pendampingan Evaluasi SOP AP Biro Umum Setda Provinsi NTT	Tanggal 20 Januari 2024	Terlaksananya Penyusunan Review SOP AP	Kep Gub Nomor 443/KEP/HK/2022 (Proses Review)
	5. Pendampingan Evaluasi SOP AP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Tanggal 19 Februari 2024	Terlaksananya Penyusunan Review SOP AP	Kep Gub 136/KEP/HK/2022 (Proses review)
	6. Pendampingan Evaluasi SOP AP Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Tanggal 25 Februari 2024	Terlaksananya Penyusunan Review SOP AP	Kep Gub 367/KEP/HK/2020 (Proses review)
B	Pelayanan Publik			
	1. Rapat persiapan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan kabupaten/Kota;		Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan kabupaten/Kota Tahun 2024;	
	2. Penyusunan Pedoman dokumen Kajian untuk pengusulan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada Kemen PAN RB;		Pedoman dokumen Kajian untuk pengusulan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada Kemen PAN RB	
	3. Pelaksanaan Evaluasi pelayanan Publik di Perangkat Daerah;		Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Publik Melalui Metode Observasi Lapangan Di Perangkat daerah (Dinas Sosial, RSUD Prof. W.Z.Yohanes Kupang dan UPTD Samsat Kota Kupang di Kupang)	
	4. Rapat Penyampaian hasil Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kemen PAN RB;		Tersedianya informasi Indeks Pelayanan Publik Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/ Kota tahun 2024	
	5. Pelaksanaan Evaluasi pelayanan Publik di Perangkat Daerah oleh Ombudsman RI		Terlaksananya Evaluasi Yanlik Melalui Metode Observasi Lapangan Di	

			Perangkat daerah (DPMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dan RSUD Prof. W.Z.Yohanes)	
	6. Fasilitasi Penyusunan / Reviu Penerapan Standar Pelayanan		Terlaksananya evaluasi penerapan SP di 4 PD yaitu : Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.	
	7. Penyiapan laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT;		Tersedianya data SKM Biro Organisasi Semester I tahun 2024.	
	8. Mengusulkan pengajuan Proposal Inovasi Pelayanan Publik untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2024;		Seleksi Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.	
	9. Koordinasi dengan USAID ERAT untuk mendukung peningkatan kualitas Pelayanan Publik;		Terlaksananya kerjasama dengan USAID ERAT Di Provinsi dan Kab/Kota terutama Lima Kabupaten Wilayah Kerja Program USAID ERAT.	

b. Permasalahan

- Sampai dengan saat ini baru 6 (enam) Perangkat Daerah yang menyampaikn SOP AP;
- Hasil koreksi Review SOP AP pada 6 (enam) Perangkat Daerah belum dikembalikan ke Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
- Kegiatan Sosialisasi dan Informasi Pendampingan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik kepada 5 PD Provinsi yaitu Dinas Sosial, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pencatatan Sipil RSUD Prof. W.Z. Yohannes Kupang mendapat sanggahan terkait ketidak puasan perolehan nilai yang ditetapkan oleh Ombudsman RI.
- Penyampaian Laporan Pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh perangkat daerah tidak tepat waktu dan format laporan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- Kegiatan Sosialisasi dan Informasi Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) kepada 3 PD yaitu Dinas Sosial, RSUD W. Z. Yohannes Kupang dan UPTD Pendapatan wilayah kota Kupang, mendapat respon baik dari perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian

c. Solusi

- Biro Organisasi telah menyampaikan Surat Penegasan Evaluasi SOP AP kepada Perangkat Daerah sehingga diharapkan seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT segera memasukan Draft SOP AP untuk dapat di Review dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.
- Memberikan ruang konsultasi dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang ada.
- Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik unit penyelenggara pelayanan publik dan diperlukan pengalokasian anggaran yang proporsional.
- Perlu dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

### III. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

#### 1. Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I sesuai dengan Renja/DPA 2024

Alokasi anggaran tahun 2024 dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.6

No.	Sub Kegiatan	Alokasi dana	Target Triwulan I %	Realisasi Triwulan I %	Hasil	Ket.
1	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp. 102.678.125	Rp. 26.371.770	25,68 %		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp. 1.758.000	Rp. 207.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Cetak	Rp. 2.966.125	Rp. 1.945.000			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 9.920.000	Rp. 3.000.000			
	Belanja Lembur	Rp. 18.406.000	Rp. 4.555.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 34.134.000	Rp. 16.264.770			
2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja	Rp. 255.356.250	Rp. 52.826.947	20,69 %		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp. 2.333.000	Rp. 628.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - kertas Cover	Rp. 3.546.000	Rp. 811.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Cetak	Rp. 8.786.250	Rp. 1.590.000			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 10.500.000	Rp. 1.200.000			
	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 83.900.000	Rp. 12.850.000			
	Belanja Lembur	Rp. 5.3475.000	Rp. 3.760.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 92.816.000	Rp. 6.854.000			

#### 2. Pelaksanaan Kegiatan dan Tugas Lainnya

a. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Tugas terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Hasil	Ket.
A.	Reformasi Birokrasi			
	1. Evaluasi RB General Provinsi NTT Tahun 2023 dan Penyusunan Rencana Aksi RB General Tahun 2024 Perangkat Daerah	Tanggal 26 Januari 2024	Terlaksananya evaluasi terhadap renaksi RB general tahun 2023	Surat nomor: 000.8.6/01/BO3.2

	Pengampu.			
	2. Penyampaian penyusunan rencana aksi RB general pemerintah provinsi NTT tahun 2024	Tanggal 29 Januari 2024	Tersusunnya rencana aksi RB general tahun 2024	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-tTK9jUiEGePZrAsS9d8bwvGc8RBI8ka/edit#gid=1872451300">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-tTK9jUiEGePZrAsS9d8bwvGc8RBI8ka/edit#gid=1872451300</a>
	3. Penyusunan <i>Logical Framework</i> dan Rencana Aksi RB Tematik Pemprov NTT	Tanggal 18 Maret 2024	Tersusunnya <i>Logical Framework</i> Aksi RB Tematik Pemprov NTT	Surat Nomor : 000.8.6/10/BO/3.2
	4. Rapat Rencana Aksi Tindak Lanjut Evaluasi (RATL) RB General dan Tematik Berdasarkan Hasil KemenPANRB Tahun 2023.	Tanggal 7 dan 8 Maret 2024	Terlaksananya Rapat Rencana Aksi Tindak Lanjut Evaluasi (RATL) RB General dan Tematik Berdasarkan Hasil KemenPANRB Tahun 2023.	
	5. Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Evaluasi (RATL) RB General.	Tanggal 15 Maret 2024	Tersusunnya RATL RB general	<a href="https://bit.ly/FormatRencanaAksiRB">https://bit.ly/FormatRencanaAksiRB</a>
	6. Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Evaluasi (RATL) RB Tematik.	Tanggal 15 Maret 2024	Tersusunnya RATL RB tematik	<a href="https://bit.ly/FormatRencanaAksiRB">https://bit.ly/FormatRencanaAksiRB</a>
	7. Menyusun draft peraturan gubernur tentang <i>roadmap</i> reformasi birokrasi pemerintah provinsi NTT tahun 2023-2026	Januari- Maret	Tersusunnya draft peraturan gubernur tentang <i>roadmap</i> reformasi birokrasi pemerintah provinsi NTT tahun 2023-2026	
	8. Menyusun SK Tim Pelaksana RB Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024	Maret	Tersusunnya Keputusan Tim Pelaksana RB Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024	
	9. Melakukan studi tiru pelaksanaan reformasi birokrasi di Jogjakarta	Tanggal 30 Januari 2024	Memahami pelaksanaan reformasi birokrasi	
B	Akuntabilitas Kinerja			
	1. Menyusun LKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023.	Januari s.d Maret 2024	Tersusunnya dokumen LKIP Pemprov NTT Tahun 2024	
	2. Menyusun PK Gubernur NTT tahun 2024 tahun 2024	Maret 2026	Tersusunnya dokumen PK Gubernur 2024	
	3. Menyusun Rencana Aksi Pemprov. NTT Tahun 2024	Maret 2024	Tersusunnya <i>Rencana Aksi Pemprov, NTT TAHUN 2024</i>	
	4. Memfasilitasi penyusunan LKIP, PK dan Rencana Aksi PD lingkup Pemprov.NTT	Februari 2024	Tersusunnya dokumen LKIP, PK dan Rencana Aksi	

			PD.	
	5. Melakukan Fasilitasi Dan Pembinaan SAKIP di Kabupaten, Malaka, Kab. Sikka, Kab. Alor, Kab. TTS	Januari s.d Februari 2024	Terlaksananya faslitasi dan pembinaan saking di Kabupaten, Malaka, Kab. Sikka, Kab. Alor, Kab. TTS	
	6. Melakukan konsultasi penilaian AKIP di Kementerian PAN dan RB	Februari 2024	Terlakasanya Kegiatan Konsultasi	
	7. Menyusun RATL Penilaian akip Pemprov NTT Tahun 2023	Maret 2024	Tersusunnya RATL AKIP Tahun 2024	
	8. Memfasilitasi penyusunan Cascading PD	Januari s.d Februari 2024	Tersusunnya Cascading PD	

**b. Permasalahan**

- Sampai saat ini baru 4 PD yang menyusun rencana aksi RB general;
- Sampai saat ini belum ada rencana aksi RB tematik;
- Belum tersusunnya kerangka logis RB tematik;
- Belum selesai melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Roadmap RB Pemerintah Provinsi NTT tahun 2023-2026.
- Nilai SAKIP Pemprov NTT belum mencapai target RPJMD
- Masih banyak PD yang belum membuat Cascading Kinerja

**c. Solusi**

- Biro Organisasi telah melakukan desk dan pendampingan serta penjelasan mengenai penyusunan rencana aksi RB general maupun RB tematik kepada PD pengampu/ pelaksana RB general dan RB tematik.
- Melakukan koordinasi mengenai penyusunan roadmap dengan kementerian PANRB.
- Melakukan reuiu berbagai dokumen perencanaan agar terjadi keselarasan
- Melakukan desk penyusunan Cascading

### 3.4. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			OUTPUT	
			KONDISI AWAL 2023	TARGET TAHUN 2023 SEBELUM PERUBAHAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tertaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Hasil Evaluasi Kelembagaan PD Provinsi	100%	100%	100%	37,35	
		Jumlah usulan penataan kelembagaan kabupaten/kota yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	-	
2.	Tertaksananya Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Persentase Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	100 %	100 %	96,96%	0 %	100%

		Persentase Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kabupaten /Kota	100%	100 %	100%	13.36%	100%
3.	Meningkatnya Perangkat Daerah yang melaksanakan Tatalaksana Pemerintahan sesuai Regulasi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Tatalaksana Pemerintahan sesuai Regulasi	100%	100%	100%	-	
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat	100%	100%	100%		
5.	Tertelaksananya Pelayanan Administrasi Ketatausahaan Biro yang mencakup Perencanaan, Keuangan serta Kepegawaian dan Umum	Persentase kualitas pelayanan ketatausahaan Biro	100%	100%	100%	25.49%	25.49%
6.	Tertelaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.	Persentase Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.	100%	100%	100%	37.35%	37.35%

7.	Tertaksananya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	26%	26%
8.	Tertaksananya Budaya Kerja Perangkat Daerah	Persentase Budaya Kerja Perangkat Daerah	100%	0%	100%	0%	0%

## PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I merupakan pertanggungjawaban kinerja periode yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atau pelaksanaan sasaran suatu organisasi yang ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitan tersebut Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Laporan Kinerja Triwulan I yang sekaligus merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2024. Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi peningkatan Akuntabilitas Kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk meningkatkan capaian triwulan berikutnya maka beberapa rekomendasi atau langkah-langkah yang diperlukan adalah :

- a. Peningkatan pemahaman pengetahuan dan ketrampilan terhadap tugas dan fungsi antara lain dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan
- b. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan skala Prioritas;
- c. Memberikan ruang konsultasi dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang ada;
- d. Perlu dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
- e. Melakukan koordinasi mengenai penyusunan roadmap dengan kementerian PANRB.
- f. Melakukan reviu berbagai dokumen perencanaan agar terjadi keselarasan
- g. Melakukan desk penyusunan Cascading

Kupang, 24 Juli 2024

Plt. Kepala Biro Organisasi  
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Djoese S. M. Nai Buti, S.Pt, M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197103291999031002